

EFEKTIVITAS PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Putri Nafisa¹, Arpandi², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: putrinafisa477@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena, yaitu: Pelaksanaan kegiatan aktivasi IKD belum merata, Terdapat gangguan teknis dan koneksi jaringan internet yang tidak stabil serta proses aktivasi IKD belum bisa dilakukan secara mandiri, Terbatasnya fungsi IKD dalam memuat layanan dan informasi kependudukan masyarakat, serta Sosialisasi penerapan IKD belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan IKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penentuan informan melalui *purposive sampling* sebanyak 15 orang. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan IKD masih belum sepenuhnya efektif diukur berdasarkan indikator efektivitas menurut teori Campbell J.P, yaitu: pertama, sub variabel keberhasilan program dengan indikator pengetahuan program cukup efektif dan penerapan program kurang efektif; kedua, sub variabel keberhasilan sasaran dengan indikator sasaran program kurang efektif dan mekanisme mempertahankan sasaran cukup efektif; ketiga, sub variabel kepuasan terhadap program dengan indikator kepuasan pelaksanaan cukup efektif dan kualitas aplikasi kurang efektif; keempat, tingkat input dan tingkat output dengan indikator tingkat input cukup efektif dan tingkat output kurang efektif; kelima, sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator transparansi dan penilaian program dinilai kurang efektif. Faktor pendukung meliputi kerja sama lintas sektor, kecukupan sumber daya, serta inovasi pelayanan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan teknologi, pola sosialisasi yang insidental, keterbatasan integrasi layanan, serta belum adanya pelatihan khusus bagi pegawai.

Kata Kunci: Efektivitas, Identitas Kependudukan Digital, Inovasi Digital

ABSTRACT

This research is motivated by several issues: including uneven activation activities, technical problems and unstable internet connectivity that prevent independent activation, limited IKD functions in providing population services and information, and uneven socialization of IKD implementation. This research aims to analyze the effectiveness of IKD implementation at the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of Hulu Sungai Utara Regency and to identify factors influencing its implementation. The study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with informants selected using purposive sampling involving 15 participants. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that the effectiveness of IKD implementation still less effective based on Campbell J.P.'s effectiveness indicators. Program knowledge and implementation satisfaction are fairly effective, while program implementation, target achievement, application quality, output level, transparency, and program evaluation are less effective. Supporting factors include cross-sector collaboration, adequate resources, and service innovation, whereas inhibiting factors include technological limitations, incidental socialization, limited service integration, and the absence of specialized staff training.

Keywords: Effectiveness, Digital Population Identity, Digital Innovation

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Di era tata kelola yang baik, layanan publik dituntut untuk memberikan layanan secara efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital merupakan strategi utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan, yang menyangkut hak-hak mendasar setiap warga negara.

Salah satu manifestasi nyata transformasi digital dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan adalah Identitas Penduduk Digital (IKD). Program ini diluncurkan berdasarkan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital yang menjadi dasar hukumnya. Identitas Penduduk Digital (IKD) merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk menampilkan dokumen kependudukan dan data umpan balik dalam sebuah aplikasi digital melalui perangkat elektronik sebagai identitas resmi penduduk. Penerapan Identitas Penduduk Digital (IKD) diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada e-KTP fisik, menekan biaya pengadaan blangko, serta meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat. Layanan yang dapat dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya sebatas KTP-el digital, tetapi juga mencakup dokumen kependudukan lain seperti kartu keluarga, biodata penduduk, akta pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan. Selain itu, Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga memuat data balikan dari pengguna layanan publik maupun privat yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga penduduk dapat mengakses layanan administrasi secara lebih cepat, terintegrasi, dan aman langsung melalui aplikasi.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data agregat kependudukan semester I tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebanyak 238.435 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, 214 desa, dan 5 kelurahan. Penduduk wajib KTP berjumlah 176.686 jiwa, namun hingga 27 Oktober 2025 jumlah masyarakat yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 7.632 orang atau 4,42% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 30%, sehingga menunjukkan bahwa penerapan IKD di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum merata. Tingkat aktivasi IKD juga menunjukkan variasi antar kecamatan, dengan capaian tertinggi di Kecamatan Amuntai Tengah sebesar 6,54% dan terendah di Kecamatan Danau Panggang sebesar 2,12%. (*Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester I tahun 2025*)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala dalam efektivitas penerapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pertama, pelaksanaan kegiatan aktivasi IKD belum merata dan masih terfokus di wilayah perkotaan, sehingga belum menjangkau seluruh masyarakat dan menyebabkan capaian sasaran program belum optimal. Kedua, proses aktivasi IKD masih bergantung pada petugas Dukcapil dan layanan jemput bola, serta terkendala gangguan teknis dan jaringan internet yang tidak stabil. Kondisi ini berdampak pada rendahnya capaian aktivasi yang masih jauh dari target nasional. Ketiga, fungsi IKD dalam memuat layanan dan informasi kependudukan masih terbatas, sehingga memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas aplikasi. Keempat, sosialisasi penerapan IKD belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat umum dan masih lebih

banyak diarahkan kepada instansi, sehingga pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme penggunaan IKD masih rendah.

Efektivitas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penelitian ini dianalisis dengan mengacu pada teori efektivitas menurut Campbell J.P dalam Sawir (2020:127). Untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah, efektivitas penerapan IKD diukur melalui lima indikator utama, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan di atas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

METODE

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena, yaitu: Pelaksanaan kegiatan aktivasi IKD belum merata, Terdapat gangguan teknis dan koneksi jaringan internet yang tidak stabil serta proses aktivasi IKD belum bisa dilakukan secara mandiri, Terbatasnya fungsi IKD dalam memuat layanan dan informasi kependudukan Masyarakat, serta Sosialisasi penerapan IKD belum merata. Jenis kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pendekatan yang berfokus untuk menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena. Sahir (2021:6) melihat bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap suatu fenomena berdasarkan persepsi yang diperoleh di lapangan, dengan hasil analisis yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian verbal. Sedangkan Creswell (Leo Agustino, 2022:211) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dipahami sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk menggali serta memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap berbagai permasalahan sosial.

Sasaran utama dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan masyarakat pengguna maupun nonpengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang keseluruhan berjumlah 15 orang informan. Pada penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sumber data utama yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2023:289). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam suatu penelitian karena pencapaian tujuan penelitian sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai metode pengumpulan data, peneliti tidak dapat menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Sugiyono, 2023:296). Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam Hardani, dkk (2020:163) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaji peneliti berdasarkan variabel

efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam Sawir (2020:127). Teori ini mencakup beberapa indikator terkait efektivitas yaitu:

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program dapat dilihat dari sejauh mana pegawai memahami isi program serta bagaimana program tersebut diterapkan, sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

a. Pengetahuan Program

Pengetahuan Program merupakan tingkat pemahaman petugas atau pelaksana mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme suatu program. Semakin baik pengetahuan, semakin efektif pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap program Identitas Kependudukan Digital (IKD) tergolong cukup efektif. Pegawai telah memahami mekanisme, tujuan, dan manfaat program IKD, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Temuan ini sejalan dengan teori keberhasilan program menurut Campbell J.P., khususnya pada indikator pengetahuan program. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh pelatihan formal dan bimbingan teknis yang terstruktur, sehingga penerapan pengetahuan di lapangan, terutama dalam penyampaian kepada masyarakat, masih perlu ditingkatkan

b. Penerapan Program

Penerapan Program merupakan bagaimana suatu program dijalankan atau diimplementasikan di lapangan. Ini meliputi langkah-langkah, prosedur, dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan program. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong kurang efektif. Meskipun pelaksanaannya telah mengacu pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 dan didukung oleh berbagai inovasi layanan, seperti layanan keliling dan jemput bola, jangkauan serta pemerataan layanan aktivasi IKD masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal dan belum mendorong kemandirian masyarakat dalam proses aktivasi. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori keberhasilan program menurut Campbell J.P. pada indikator penerapan program, karena meskipun telah didukung kebijakan dan inovasi pelayanan, hasil implementasi IKD di lapangan belum menunjukkan efektivitas yang optimal.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

a. Sasaran Program

Sasaran program adalah kelompok orang, instansi, atau pihak tertentu yang menjadi target utama dari suatu program. Artinya, program dibuat dan dijalankan dengan tujuan untuk memberikan manfaat atau layanan kepada mereka. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong kurang efektif. Meskipun sasaran program ditujukan bagi seluruh

penduduk berusia 17 tahun ke atas pemilik KTP elektronik, pelaksanaannya belum berjalan merata karena masih terfokus pada aparatur sipil negara, mahasiswa, dan instansi tertentu. Akibatnya, masyarakat umum, khususnya yang berada di wilayah terpencil, belum tersosialisasi secara optimal sehingga capaian aktivasi IKD masih rendah. Temuan ini tidak sejalan dengan teori keberhasilan program menurut Campbell J.P. pada indikator sasaran program, karena jangkauan dan pemerataan pelaksanaan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara menyeluruh.

b. Mekanisme Mempertahankan Sasaran

Mekanisme mempertahankan sasaran adalah serangkaian langkah, prosedur, atau strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa sasaran program tetap berjalan sesuai rencana dan tidak keluar dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme sasaran program Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai inovasi pelayanan, khususnya layanan jemput bola, yang mampu mempermudah masyarakat dalam proses aktivasi IKD dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran program. Temuan ini sejalan dengan teori Campbell J.P. pada aspek keberhasilan sasaran dengan indikator mempertahankan sasaran program, karena instansi pelaksana secara konsisten melakukan upaya inovatif untuk menjaga keberlangsungan dan ketercapaian sasaran. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, sehingga diperlukan peningkatan pemerataan layanan agar efektivitas program dapat ditingkatkan secara optimal.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan Terhadap program adalah kondisi ketika kualitas program yang diberikan mampu memenuhi atau melampaui harapan masyarakat.

a. Kepuasan Pelaksanaan

Kepuasan Pelaksanaan merupakan tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap pelaksanaan program. Artinya, sejauh mana masyarakat atau sasaran merasa puas dengan cara program dijalankan, pelayanan yang diberikan, dan kemudahan dalam mengakses layanan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup efektif. Inovasi pelayanan seperti kegiatan *car free day* dan layanan jemput bola dinilai mampu mempermudah akses masyarakat, serta didukung oleh pendampingan petugas yang kompeten selama proses aktivasi. Temuan ini sejalan dengan teori Campbell J.P. pada aspek kepuasan terhadap program dengan indikator kepuasan pelaksanaan. Namun demikian, kepuasan masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih adanya keterbatasan akses, seperti ketergantungan pada smartphone dengan spesifikasi tertentu, proses aktivasi yang belum dapat dilakukan secara mandiri, serta rendahnya pemanfaatan aplikasi IKD setelah aktivasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan IKD masih perlu ditingkatkan.

b. Kualitas Aplikasi

Kualitas Aplikasi merupakan tingkat kesesuaian fitur, keamanan, dan kinerja aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Kualitas aplikasi menilai apakah aplikasi tersebut mudah digunakan, andal, cepat, aman, dan mampu membantu sasaran program dalam melakukan tugas atau layanan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong kurang efektif. Meskipun aplikasi telah menyediakan fitur utama seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan pembaruan data pribadi, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan integrasi layanan, akses fitur yang belum stabil, ketergantungan pada dokumen fisik, serta kinerja aplikasi yang dipengaruhi oleh kondisi jaringan. Selain itu, cakupan layanan dalam aplikasi masih terbatas, yakni baru mencakup sekitar separuh dari total layanan kependudukan yang tersedia, dan proses aktivasi masih memerlukan pendampingan petugas. Temuan ini tidak sejalan dengan teori Campbell J.P. pada aspek kepuasan terhadap program dengan indikator kualitas aplikasi, karena aplikasi IKD belum sepenuhnya mampu mendukung pelayanan kependudukan secara digital dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

4. Tingkat *Output* dan *Input*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yaitu dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

a. Tingkat *Output*

Tingkat *Output* merupakan hasil yang dicapai dari program, misalnya jumlah masyarakat yang berhasil diaktivasi, layanan yang terselesaikan, atau target program yang tercapai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat *output* program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong kurang efektif. Meskipun berbagai upaya aktivasi melalui layanan keliling, kampus, dan instansi telah dilaksanakan serta proses aktivasi berjalan cepat dan sesuai prosedur, capaian realisasi program masih rendah. Hingga 27 Oktober 2025, jumlah masyarakat yang berhasil mengaktivasi IKD baru mencapai 7.632 orang atau 4,42% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Temuan ini kurang sejalan dengan teori Campbell J.P. pada aspek tingkat output dengan indikator tingkat *output*, karena rendahnya capaian tersebut menunjukkan bahwa jangkauan layanan, partisipasi masyarakat, dan pemerataan aktivasi di seluruh kecamatan belum optimal, sehingga *output* program secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan.

b. Tingkat *Input*

Tingkat *input* merupakan semua sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program, misalnya tenaga kerja, waktu, dana, peralatan, dan sarana/prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat input program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, perangkat pendukung, jaringan, serta tenaga

pelaksana yang kompeten dalam mendukung kegiatan aktivasi IKD. Temuan ini sejalan dengan teori Campbell J.P. pada aspek tingkat output dan input dengan indikator tingkat input. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah petugas dan waktu pelaksanaan masih memengaruhi capaian aktivasi di lapangan. Namun secara keseluruhan, sumber daya, sarana, dan prasarana yang tersedia telah memadai untuk mendukung pelaksanaan program IKD.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh adalah sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

a. Transparansi Program

Transparansi program adalah keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi, termasuk tujuan, manfaat, prosedur, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan sosialisasi yang belum merata melalui berbagai media, baik kunjungan lapangan, media sosial, brosur, maupun website, khususnya di wilayah desa dan daerah terpencil. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memahami tujuan, manfaat, serta prosedur program IKD secara menyeluruh. Temuan ini tidak sejalan dengan teori Campbell J.P. pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator transparansi program, karena keterbatasan penyebaran informasi berdampak pada rendahnya pemanfaatan dan capaian aktivasi IKD di masyarakat.

b. Penilaian Program

Penilaian Program merupakan proses menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penilaian program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tergolong kurang efektif. Meskipun sistem dan dukungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tersedia dengan baik, pemanfaatan program oleh masyarakat dan instansi terkait masih rendah, serta belum seluruh instansi menerima IKD sebagai dokumen digital yang sah. Selain itu, adanya indikasi penipuan terkait aktivasi dan pelaksanaan sosialisasi yang belum merata turut memengaruhi capaian program. Temuan ini tidak sejalan dengan teori Campbell J.P. pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator penilaian program, karena keterbatasan capaian dan pemanfaatan menunjukkan bahwa efektivitas, kualitas pelaksanaan, dan manfaat program IKD bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaya mengoptimalkan penerapan inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas program, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun kesiapan masyarakat.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala kondisi, sumber daya, kebijakan, maupun upaya yang berperan membantu, memperlancar, dan memperkuat pelaksanaan suatu program sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

a. Adanya Kerja Sama Lintas Sektor

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi faktor pendukung yang efektif dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kolaborasi antara Disdukcapil, SKPD, instansi vertikal seperti Polres dan Kodim, serta lembaga pendidikan terbukti meningkatkan capaian target dan efektivitas pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD).

b. Tercukupinya Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Dinas Dukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah efektif. Perangkat yang tersedia saat ini sudah memadai dan tenaga pelaksana sudah tercukupi, seluruh pegawai menguasai sistem serta memberikan pelayanan yang jelas dan ramah, sehingga menjadi faktor pendukung utama efektivitas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

c. Adanya Inovasi Pelayanan untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa inovasi pelayanan menjadi faktor pendukung yang efektif dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui berbagai inovasi seperti layanan keliling yaitu inovasi PALING SIP (Pelayanan Admindak Keliling Setiap Minggu Pagi) saat *car free day*, program Jempol Manis, dan Bailang Pakacil, Dinas Dukcapil berhasil memperluas jangkauan pelayanan dan mempermudah masyarakat yang jarang datang ke kantor untuk melakukan aktivasi IKD, sehingga capaian program meningkat secara signifikan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala kondisi, keterbatasan, maupun kendala yang dapat menghambat, memperlambat, atau mengurangi efektivitas pelaksanaan suatu program sehingga tujuan yang telah ditetapkan belum dapat tercapai secara optimal.

a. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur Digital

Keterbatasan teknologi dan infrastruktur digital merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam penerapan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hambatan tersebut meliputi ketidakmerataan dan ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan fitur dan kesiapan aplikasi IKD, serta rendahnya kepemilikan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan smartphone. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas program, mulai dari rendahnya pemerataan pengetahuan masyarakat terhadap IKD, terhambatnya proses aktivasi di lapangan, hingga belum tercapainya sasaran program secara optimal, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, kendala teknis yang berulang berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk memanfaatkan IKD secara berkelanjutan, memengaruhi kualitas aplikasi yang dirasakan, serta membatasi capaian *output* program. Dengan demikian, keterbatasan teknologi dan infrastruktur digital menunjukkan bahwa kesiapan sumber

daya pendukung program IKD masih perlu ditingkatkan agar efektivitas program dapat tercapai secara maksimal.

- b. Pola sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bersifat Insidental dan tidak terjadwal

Pola sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bersifat insidental dan tidak terjadwal menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan program IKD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sosialisasi dan aktivasi yang masih bergantung pada kegiatan tertentu, seperti layanan keliling dan inovasi pelayanan lainnya, menyebabkan penyebaran informasi dan pelaksanaan aktivasi belum berjalan secara konsisten dan merata. Kondisi ini mengakibatkan sebagian masyarakat belum memahami tujuan, manfaat, serta tata cara penggunaan IKD, sehingga partisipasi dalam proses aktivasi masih rendah. Dampaknya terlihat pada beberapa indikator efektivitas program, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat, belum optimalnya penerapan program di seluruh wilayah, kurangnya transparansi informasi, serta penilaian masyarakat terhadap program yang belum terbentuk secara baik. Pada akhirnya, pola kegiatan yang tidak terjadwal dan tidak berkelanjutan tersebut berkontribusi terhadap rendahnya capaian output program IKD di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- c. Keterbatasan integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada layanan publik

Keterbatasan integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada layanan publik merupakan salah satu faktor penghambat dalam efektivitas penerapan IKD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun IKD telah diakui sebagai identitas resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemanfaatannya belum diterima secara menyeluruh oleh seluruh instansi layanan publik sebagai pengganti KTP fisik. Kondisi ini menyebabkan penggunaan IKD masih terbatas dan manfaat digitalisasi identitas kependudukan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, keterbatasan fitur dan layanan dalam aplikasi IKD turut memengaruhi rendahnya pemanfaatan di berbagai sektor layanan. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada beberapa indikator efektivitas program, yaitu kualitas aplikasi yang belum optimal, penerapan program yang belum merata, rendahnya *output* program, serta penilaian masyarakat terhadap efektivitas IKD yang masih rendah. Keterbatasan integrasi ini juga memengaruhi keberlanjutan sasaran program, karena minimnya manfaat yang dirasakan menurunkan minat masyarakat.

- d. Tidak adanya pelatihan khusus untuk pegawai terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Tidak adanya pelatihan khusus bagi pegawai terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu faktor penghambat efektivitas penerapan IKD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketiadaan pelatihan menyebabkan pemahaman pegawai mengenai IKD belum seragam dan kemampuan teknis di lapangan masih terbatas, sehingga penyampaian informasi serta pendampingan kepada masyarakat belum optimal. Kondisi ini berdampak pada beberapa indikator efektivitas program, antara lain rendahnya kualitas pengetahuan program yang disampaikan, kurang optimalnya penerapan program di lapangan, serta menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan IKD. Selain itu, keterbatasan kompetensi teknis pegawai turut

memengaruhi rendahnya tingkat output program, karena capaian aktivasi IKD belum dapat ditingkatkan secara maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan IKD Pada DISDUKCAPIL Kab. HSU saat ini masih belum sepenuhnya optimal sehingga pelaksanaannya dinilai masih belum sepenuhnya efektif yang diukur berdasarkan teori Campbell J.P dalam (Sawir, 2020:127) yaitu: Dilihat dari indikator: *Pertama*, Pengetahuan Program cukup efektif karena pegawai dinas dukcapil HSU telah memahami mekanisme, tujuan dan manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) namun belum maksimal karena kurangnya pelatihan. *Kedua* Penerapan Program yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan kurang efektif, yang mana penerapannya belum merata menjangkau seluruh wilayah Hulu Sungai Utara terlihat dari jumlah lokasi yang hanya mencakup beberapa titik tertentu dan belum menjangkau seluruh desa. *Ketiga* Sasaran Program untuk mencapai keberhasilan sasaran kurang efektif karena pelaksanaan sasaran program masih belum merata dan terfokus pada ASN, mahasiswa dan instansi pemerintahan. *Keempat* Mekanisme Mempertahankan Sasaran untuk mencapai keberhasilan sasaran cukup efektif karena dinas dukcapil HSU telah melakukan berbagai inovasi pelayanan untuk mencapai dan mempertahankan sasaran program. *Kelima*, Kepuasan Pelaksanaan untuk mencapai kepuasan terhadap program cukup efektif karena meskipun mekanisme sesuai dengan regulasi namun dalam pelaksanaannya masih terkendala pada perangkat *smartphone* masyarakat, aktivasi yang belum bisa secara mandiri dan kurangnya pemanfaatan aplikasi setelah aktivasi. *Keenam* Kualitas aplikasi kurang efektif karena aplikasi belum mencakup fitur yang cukup dan hanya menyediakan 10 jenis pelayanan sedangkan pelayanan yang tersedia di dinas dukcapil ada 20 dokumen. *Ketujuh* Tingkat *Output* kurang efektif karena terlihat dari rendahnya capaian target yaitu per 27 Oktober 2025 baru mencapai 4,42% dan masih jauh dari target nasional yaitu 30%. *Kedelapan* Tingkat *Input* cukup efektif dikarenakan telah tersedianya dana, sarana, prasarana, perangkat, jaringan serta tenaga pelaksana yang kompeten meski jumlahnya terbatas dan terkadang terkendala jaringan. *Kesembilan* Transparansi kurang efektif karena terlihat dari sosialisasi yang belum merata menjangkau semua wilayah dan sasaran. *Kesepuluh* Penilaian Program kurang efektif dikarenakan dilihat dari sosialisasi belum merata, capaian program rendah, sehingga efektivitas, kualitas pelaksanaan, dan manfaat bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain: faktor pendukung, yaitu Adanya kerja sama lintas sektor, Tercukupinya sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta Adanya inovasi pelayanan untuk aktivasi IKD. Sedangkan faktor penghambat yaitu Keterbatasan teknologi dan infrastruktur digital, Pola sosialisasi dan aktivasi yang bersifat insidental, Keterbatasan integrasi IKD dengan layanan publik, dan Tidak adanya pelatihan khusus terkait IKD bagi pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2022) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2nd Edn. Bandung: Alfabeta.

Muhammad Sawir (2020) *Birokrasi Pelayanan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Deepublish. Cetakan Pe. Edited By A. Nabila. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Available At: [Http://Repository.Uniyap.Ac.Id](http://Repository.Uniyap.Ac.Id).



Peraturan Mendagri (2022) ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital’, *Kementerian Dalam Negeri Ri*, Pp. 1–32.

Sahir, S. (2021) *Metodologi Penelitian*. 1st Edn, *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st Edn. Edited By T. Koryati. Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia. Available At:
[Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab Iii.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab%20Iii.Pdf).

Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. In Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd Edn, *Alfabeta*. 2nd Edn. Edited By Sutopo. Bandung: Alfabeta.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2025) *Buku Agregat Kependudukan Tahun 2025 Semester I*.